

REALITAS PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI ALAT PEMERSATU BANGSA

Dian Ramadan Lazuardi
Dosen Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
STKIP PGRI Lubuklinggau
(ddngirl@email.com/087894648508)

ABSTRAK

Bahasa Indonesia mempunyai sejarah jauh lebih panjang dari pada republik ini sendiri. Bahasa Indonesia telah dinyatakan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928, jauh sebelum Indonesia merdeka. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 mengamanatkan kepada pemerintah agar mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memelihara dan mempertahankan bahasa daerah, dan mengusahakan internasionalisasi bahasa Indonesia. Amanat konstitusional tersebut tentu saja bukanlah tugas yang mudah, mengingat kompleksitas kebahasaan yang ada di dalam konteks masyarakat yang global ini. Makalah ini akan memotret realitas kekinian bahasa Indonesia yang sejatinya menjadi salah satu kebanggaan dan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, konstitusi negara telah mencoba merumuskan upaya pemertabatan bahasa nasional tersebut. Namun, disisi lain akan tergambar kondisi bahasa Indonesia sebagaimana digunakan oleh para penuturnya yang menyiratkan ketidakbanggaan menjadi pengguna bahasa Indonesia. Penulis meyakini, salah satu sumber penyebabnya adalah karena situasi kebahasaan saat bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa nasional pada 28 Oktober 1928 yaitu bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Melayu, bagaimanapun bukan merupakan atau tidak menjadi nilai budaya inti bangsa Indonesia, yang akibatnya kebanggaan dan rasa memiliki secara hakiki terhadap bahasa nasional itu dapat luntur seiring dengan perkembangan zaman yang meliputinya. Oleh karena itu, makalah ini menawarkan sejumlah peluang untuk tetap menjadikan bahasa Indonesia hidup dan bermartabat dalam terpaan dan kancangannya angin globalisasi.

Kata kunci: Realitas, bahasa Indonesia, bahasa persatuan

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki kekayaan budaya. Dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika", maka meskipun berdeda-beda budayanya masyarakat Indonesia tetap satu juga, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah "Sumpah Pemuda" yang telah diikrarkan jauh sebelum Indonesia merdeka, pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah pemuda itu sampai sekarang masih terus

dijaga demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tercinta. Sebagai salah satu janji dalam "Sumpah Pemuda", bahasa Indonesia diangkat sebagai bahasa pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa lahir dengan latar psikologis, bahwa pemiliknya adalah bangsa yang sama-sama pernah terjajah dan tertindas, sehingga ingin bersatu agar menjadi bangsa yang kuat. Untuk itu dirasakan perlunya alat pemersatu

yang dijunjung dan dimiliki bersama, yaitu bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya hingga kini, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia telah dikuatkan sebagai bahasa resmi kenegaraan melalui Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009. Dengan kedudukan bahasa Indonesia yang mantap dasar hukumnya itu, seharusnya nasib kehidupannya pun mantap di kalangan masyarakat pemilikinya. Namun tidak demikian faktanya di lapangan, sebab bila dicermati tampak bahwa fungsi bahasa Indonesia di kalangan masyarakat pemilikinya kini banyak yang mulai tergeser oleh bahasa asing. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional sesungguhnya akan tetap terhormat jika bangsa Indonesia sebagai pemilikinya mampu bersikap positif terhadapnya. Sikap positif itu akan menempatkan bangsa ini pada status yang lebih bermartabat. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang mampu menghormati dan bangga terhadap kekayaan budayanya sendiri. Dalam konteks ini adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sekaligus lambang identitas jati diri dan kebanggaan bangsa.

Namun demikian, upaya pemertabatan yang diusung melalui politik bahasa nasional ini, tampaknya tidak senantiasa sejalan dengan realitas yang ditemukan dalam masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Mereka seolah-olah melakukan 'pemberontakan' terhadap bahasa Indonesia, yang pada gilirannya, baik secara sadar ataupun tidak, justru melemahkan bahkan merusak martabat bahasa Indonesia itu sendiri. Gejala alih/ganti kode yang tidak

pada tempatnya, penggunaan kata atau frasa bahasa asing yang berlebihan, penciptaan 'bahasa gaul' yang over-creative, pembuatan kebijakan yang salah kaprah, merupakan sejumlah contoh yang bisa dinisbatkan sebagai upaya pelemahan status bahasa Indonesia. Makalah ini akan menilik gejala-gejala kontradiktif seperti disebutkan di atas seraya menawarkan sejumlah langkah yang dapat diambil untuk menjamin pelaksanaan bahasa nasional itu berada pada jalur yang dikehendaki keberhasilannya.

2. Seputar Kelahiran Bahasa Nasional Indonesia dan Status NilaiBudayaIntinya.

Istilah bahasa Indonesia lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajah Belanda yang telah sangat lama menghuni negeri Indonesia. Para (pemuda) pejuang yang memimpin pergerakan Indonesia merdeka saat itu berasal dari berbagai suku bangsa. Beberapa diantara mereka merupakan pemimpin dari pergerakan organisasi lokal atau bersifat kesukuan. Takayal lagi, mereka pun bertutur dalam bahasa daerahnya. Namun demikian, pada pergerakan yang lebih menasional, bahasa daerah tidak dapat digunakan untuk berkomunikasi di antara mereka. Mereka harus menyepakati sebuah bahasa pengantar yang bisa menyamakan visi pergerakan mereka. Para pejuang itu menyadari bahwa kebersamaan dalam perjuangan harus diikat oleh kesamaan visi, dan visi tersebut akan mudah dimengerti dan dipahami bersama manakala di antara mereka ada bahasa yang sama untuk memahaminya. Di sinilah kesadaran mereka muncul, bahwa bahasa daerah

masing-masing tidak mungkin digunakan untuk menyatukan visi perjuangan mereka. Saat itu, bahasa Melayu telah secara luas digunakan sebagai lingua franca, bahasa pergaulan di berbagai kalangan. Ekologi bahasa Melayu memberikan ruang yang sangat luas kepada para pemimpin perjuangan Indonesia merdeka untuk menjatuhkan pilihan mereka kepada bahasa Melayu tersebut sebagai bahasa persatuan di antara mereka. Saat itu, pada 28 Oktober 1928, mereka tampil ke muka menyatakan memiliki sebuah bahasa persatuan, yang mereka junjung tinggi dengan nama bahasa Indonesia.

Kelahiran bahasa Indonesia dalam situasi seperti itu menyisakan sejumlah pertanyaan apabila dikaitkan dengan jati diri bahasa Indonesia itu sendiri. Yang manakah sebetulnya yang disebut dengan bahasa Indonesia itu? Kalau dia diturunkan dari bahasa Melayu, mengapa ia tidak disebut bahasa Melayu saja? Seberapa beda ia dengan bahasa Melayu? Siapa pemilik bahasa Indonesia itu? Akan dibawa ke mana perkembangan bahasa Indonesia itu kelak? Dan masih banyak pertanyaan lain yang bisa ditunjukkan kepada situasi kelahirannya tersebut. Sejatinya, sebuah bahasa akan menjadi milik dan identitas para penuturnya. Situasi kelahiran bahasa Indonesia seperti digambarkan di atas tidak memungkinkan ada salah satu pihak yang akan berani menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah milik sebuah kelompok perjuangan atau bahkan milik salah satu suku. Ia melainkan menjadi identitas kelompok yang dinisbatkan kepada seluruh warga bangsa Indonesia. Sebagai identitas dari kelompok yang sangat besar dan luas itu, bahasa Indonesia sangat rentan

terhadap kematian atau setidaknya penolakan untuk terus didorong berkembang dan maju. Justru kesamaan visi perjuangan Indonesia merdeka yang kemudian terus mengokohkan keberadaan bahasa Indonesia di tengah-tengah perjuangan mereka. Alih-alih ia mati muda, bahasa Indonesia memperoleh dukungan sangat kuat dari warga bangsa Indonesia untuk terus berkembang dan memperoleh pengayaan dari unsur-unsur bahasa daerah (dan kemudian bahasa asing). Bahkan, pascakemerdekaan, bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa resmi Negara. Namun demikian, ancaman terhadap kematian bahasa Indonesia tidak kemudian surut. Setidaknya, kalau mengamati status bahasa Indonesia di hadapan para pencetus dan para penuturnya, ia bukan merupakan bagian dari inti budaya masyarakat bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sengaja diciptakan untuk kepentingan politik perjuangan. Ia tidak tumbuh dan berkembang dari atau sebagai ciri hakiki para penuturnya. Dalam hal ini, Smolicz & Secombe (dalam Santoso, 2012:28) menyatakan bahwa apabila bahasa bukan merupakan nilai budaya inti sebuah masyarakat, ia akan rentan terhadap penglepasan dan apabila ada upaya pemertahanan, maka upaya itu tidak akan terlalu kuat menopang kekokohan daya hidup bahasa tersebut. Di sisi lain, sikap para penutur terhadap bahasa tersebut pun dikhawatirkan tidak akan terlalu kuat/positif. Ancaman yang bersifat internal inilah yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam perencanaan kebijakan atau politik bahasa nasional.

3. Sikap Bahasa (Language Attitude)

Istilah sikap (attitude) digunakan pertama kalinya oleh Herbert Spencer (dalam Azwar, 2003:5) menyatakan bahwa sikap merupakan suatu kecenderungan individu untuk menerima atau menolak sesuatu berdasarkan penilaian apakah sesuatu itu berharga atau tidak bagi dirinya. Tokoh bidang pengukuran sikap, Thurstone dan Likert (dalam Azwar, 2003:5), berpendapat bahwa sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan mendukung, memihak (favorable), maupun tidak mendukung, atau tidak memihak (unfavorable), pada suatu objek yang dihadapinya. Sementara itu menurut Gerung (dalam Sunarto & Hartono, 2002:170), sikap dapat diartikan sebagai kesediaan bereaksi dari suatu individu terhadap suatu hal, berkaitan dengan motif yang mendasari tingkah laku yang berupa kecenderungan, namun belum merupakan aktivitas.

Sejalan dengan definisi sikap, Kridalaksana (2001:197) menyampaikan bahwa sikap bahasa adalah posisi mental atau perasaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau orang lain. Sikap merupakan fenomena kejiwaan, yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku. Namun berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa apa yang tampak dalam perilaku tidak selalu menunjukkan sikapnya. Begitu pula sebaliknya, sikap seseorang tidak selamanya tercermin dalam perilakunya. Sebagaimana halnya dengan sikap pada umumnya, sikap bahasa juga merupakan peristiwa kejiwaan sehingga tidak dapat diamati secara langsung. Menurut Anderson, sikap bahasa adalah tata keyakinan atau kognisi yang relatif

berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, dan objek bahasa, yang memberikan kecenderungan seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya. Sikap bahasa akan terlihat melalui perilaku berbahasa atau perilaku tuturnya. Namun tidak setiap perilaku tutur mencerminkan sikap bahasa penuturnya. Demikian pula sebaliknya, sikap bahasa penutur tidak selamanya tercermin dalam perilaku tuturnya.

4. Realitas Kekinian Penggunaan Bahasa Nasional

Walaupun sudah bisa dipastikan bahwa belum semua lapisan masyarakat bangsa Indonesia menggunakannya, bahasa Indonesia kini sudah semakin luas dipakai oleh berbagai kalangan di tanah air. Setiap kelompok pengguna bahasa Indonesia ini unik sesuai dengan perannya masing-masing. Pada bagian ini akan disajikan hasil pengamatan sekilas pandang tentang penggunaan bahasa Indonesia di/oleh tiga kelompok pengguna bahasa yang masing-masing memiliki peran yang amat berbeda. Kita akan melihat bagaimana mereka menggunakan bahasa Indonesia dan bagaimana penggunaan tersebut berpengaruh terhadap potensi kelangsungan bahasa Indonesia ke depan.

a. Di media massa

Peran dan pengaruh media, baik cetak maupun elektronik, dalam upaya mengembangkan dan membina pertumbuhan bahasa Indonesia sangat instrumental. Dengan jangkauan yang amat luas dan kekuatannya yang dahsyat dalam mempengaruhi para pengguna bahasa, media telah banyak membentuk perilaku berbahasa mereka.

Penggunaan bahasa di mediamassa dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Pertama, bahasa yang dipakai oleh para awakmedia itu, baik wartawan, penyiar, ataupun reporter, yang dapat disebut sebagai pewarta, dan yang kedua adalah bahasa yang digunakan oleh pemilik atau sumber berita. Para pewarta menggunakan bahasa dengan tujuan utama menyampaikan berita kepada para pembaca, pendengar, atau pemirsa sebagai sasaran pemberitaan. Walaupun sejatinya mereka tidak pada tempatnya untuk memberikan opini tentang sebuah isi berita, gaya pemberitaan dan pilihan kata serta kalimat yang dipakai sebetulnya bisa mencerminkan opini mereka. Yang lebih banyak bisa mempengaruhi perilaku berbahasa para pembaca, pendengar, atau pemirsa sebetulnya bukan isi berita atau opini yang disajikan pewarta, tetapi lebih pada pilihan kata yang digunakan para khususnya istilah baru atau istilah dari bahasa asing hasil kreasi para pewarta yang secara sengaja dimasukkan ke dalam berita yang dibawanya. Mereka sering beranggapan bahwa istilah baru yang digunakan di media memiliki tingkat keberterimaan lebih luas atau keterpahaman lebih tinggi, mengingat para pewarta akan senantiasa memilih kata yang paling mudah dan paling cepat dipahami para pendengar, pembaca, dan pemirsa.

Di satu sisi, anggapan itu mungkin benar adanya. Akan tetapi, di sisi lain, kreativitas yang ditunjukkan para pewarta dalam menyampaikan berita menyiratkan setidaknya dua hal. Pertama, para pewarta itu tidak memahami secara utuh ragam yang tepat untuk digunakan dalam menyampaikan berita, sehingga pilihan kata menjadi

banyak bercampur antara kata/istilah untuk digunakan sebagai ragam resmi-tidak resmi dan baku-tidak baku. Kedua, khusus terkait dengan penggunaan istilah yang diambil dari bahasa asing, hal itu dapat juga menjadi isyarat tentang terbatasnya penguasaan kosakata yang dimiliki para pewarta akan bahasa Indonesia atau ketidakmampuan menemukan padanan dalam bahasa Indonesia. Namun demikian, cara yang ditempuh para pewarta bisa juga karena memiliki alasan lain seperti ingin 'menonjolkan' bahasa asing dalam berita yang dibawanya.

Mata acara lokal dengan judul berbahasa Indonesia tampaknya tidak mengherankan, karena memang acara tersebut ditayangkan di televisi lokal dengan target pemirsa penutur bahasa Indonesia. Pilihan kata/leksikon yang digunakan di media ini pun tidak untuk terlalu jauh dipersoalkan, sebab kita masih melihat hal itu ada dalam batas-batas yang wajar dan mudah dipahami maksudnya. Judul mata acara tetap menggunakan kata dan/atau ungkapan yang singkat, walaupun terkadang menimbulkan makna taksa, baik karena bersifat metaforis maupun karena polisemi. Namun, sesuai dengan prinsipnya yang hakiki, media akan selalu mencari leksikon yang diyakini akan bisa menarik perhatian para pemirsa. Akan tetapi, persoalannya menjadi lain manakala kita melihat gejala tersebut dari sudut pandang sikap penutur/pengguna bahasa tersebut terhadap bahasa nasionalnya. Mencampuradukkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing atau bahkan menggunakan bahasa asing secara sengaja untuk judul sebuah mata acara televisi lokal,

bagaimanapun menunjukkan sikap penutur bahasa yang kurang positif terhadap bahasanya. Kita ambil misalnya contoh judul acara *Tukang Bubur Naik Haji: theSeries*, *EnglishTeacher* *Tukang*

Pecel, *Economic Challenges*, *Go Spot*, *Spotlite*, *On theSpot*, *Sports7* *Akhir Pekan*, *BreakingNews*, dan sebagainya. Semua acara itu disajikan dalam bahasa Indonesia, dengan target pemirsa penutur bahasa Indonesia. Hal yang sama dapat pula ditemukan pada media cetak yang penulis amati. Pengamatan terhadap tiga surat kabar besar, yakni *Republika*, *Media Indonesia*, dan *Pikiran Rakyat*. Pada surat kabar dan ini judul beberapa tajuknya secara disengaja menggunakan (campuran) bahasa asing (baca: Inggris). Misalnya, kita menemukan *Islam Digest*, *KickOff* (*Republika*), *Freshion*, *Interlude*, *Sportainment*, *Backpacker*, *Foodaholic*, *BacktoBoseh* (*Pikiran Rakyat*), *Kick Andy*, *Move*, *Event*, *Intermezzo* (*Media Indonesia*), *detikNews*, *detikFinance*, *detikHot* (*detik.com*), *Travelounge*, *Tempo Store* (*Tempo.com*), *Entertainment*, *Health*, *Female*, *Travel* (*kompas.com*), *Home Nasional*, *Entertainment*, *Lifestyle*.

Sulit mencari alasan yang tepat untuk memberikan pembenaran terhadap penggunaan bahasa seperti itu, kalau bukan tujuan yang amat tendensius atau sensasional. Apalagi, seperti kita percayai, bahasa Indonesia kini berada dalam masa pertumbuhan yang memerlukan pembinaan berkelanjutan. Bahasa yang digunakan oleh sumber/pemilik berita dapat berasal dari para pejabat publik dipemerintahan, tokoh masyarakat, para pesohor, atau bahkan anggota masyarakat biasa. Cara mereka

berbahasa sangat beragam dan memiliki daya tarik tersendiri bagi para pembaca, pendengar, dan pemirsa. Setali tiga uang. Bahasa yang unik yang dikreasi oleh para sumber/pemilik berita ini sering kali menjadi bahan tayangan yang menarik bagi para pewarta. Mereka secara berulang-ulang menayangkan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh sumber berita. Penayangan yang berulang, apalagi berisi ekspresi yang 'unik', akan bisa menjadi modus bagi para pengguna bahasa untuk menirunya. Apalagi, ekspresi bahasa itu berasal dari para tokoh atau pesohor yang menjadi idola masyarakat. Dapat dipastikan, para pengguna bahasa tidak akan terlalu peduli dengan ketepatan, kelayakan, atau kesesuaian penggunaan ekspresi bahasa itu, sebab mereka lebih memperhatikan tokoh di balik pembuat ekspresi bahasa itu.

Model berbahasa para pejabat publik, tokoh masyarakat, atau pesohor tingkat nasional yang terpotret oleh masyarakat awam punya peluang yang besar untuk dijadikan model berbahasa mereka. Ia bagai gelombang besar dan kuat yang melaju ke pinggiran, bisa menghanyutkan benda-benda yang ada di pinggiran itu dan ikut tersapu bersama deras dan kuatnya gelombang. Penyebaran model berbahasa musiman seperti bentukan *Ali Topan Anak Jalanan* dan *Pramborspada* tahun 80-an, *Debby Sahertian* di awal tahun 2000-an, model berbahasa *Alay* di akhir 2000-an, gaya *Syahrini*, tayangan pada acara *Silet* oleh *Peni Rose* yang *Lebay*, dan yang terkini fenomena celotehan *Vicky Prasetyo*. Begitu cepat masing-masing cara berbahasa itu menyebar dan ditiru, bukan hanya oleh masyarakat awam tetapi juga oleh masyarakat terdidik,

termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Memang benar bahwa cara berbahasa seperti disebutkan di atas itu merupakan gejala sesat yang akan hilang dalam waktu tidak terlalu lama. Akan tetapi, apabila cara-cara berbahasa seperti itu semakin luas digunakan oleh masyarakat dan dicontohkan penggunaannya oleh tokoh-tokoh, serta diperkuat oleh tayangan dalam media yang beragam saluran (cetak dan elektronik), maka hal itu dikhawatirkan akan mengganggu perkembangan bahasa Indonesia yang sedang tumbuh itu. Apalagi, para pengguna bahasa Indonesia kini lebih banyak terdiri atas kaum muda yang sedang tumbuh dan mencari identitas diri. Bukan hal yang mustahil apabila kelak kemudian hari, bahasa Indonesia mereka tidak ajeg dalam bentuk, yakni dalam konstruksi kalimatnya, dan tidak jelas dalam isi, yakni dalam pesan yang ingin disampaikan. Akibatnya, mereka menjadi pengguna bahasa Indonesia yang kurang cermat. Padahal, kecermatan berbahasa merupakan cerminan dari kecermatan berpikir dan bernalar. Oleh karena itu, sebagai wujud tanggung jawabnya, media massa, pejabat publik, tokoh masyarakat, dan pesohor sudah selayaknya ikut membangun kecerdasan masyarakat itu melalui pemberian contoh berbahasa yang pantas dan layak, sesuai dengan ranahnya.

b. Oleh masyarakat

Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa penawaran produk barang dan jasa merupakan ranah yang paling banyak mengandung penggunaan bahasa yang tidak tepat dan tidak pantas. Selain adanya campur kode dan salah ejaan, ditemukan pula pemakaian ekspresi yang tidak tepat dan tidak jelas

maksudnya. Namun demikian, karena jangkauan sebarannya relatif tidak luas, pengaruh yang ditimbulkannya pun tidak seluas dan sekuat yang dibuat oleh kelompok pertama. Cara mereka berbahasa hanya dapat diamati pada lingkup yang sangat terbatas di wilayahnya, dan mereka pun tidak memiliki harapan bahwa bahasa mereka menjadi salah satu model untuk kemudian diikuti oleh pihak lain.

Ditemukan di tempat umum yang umumnya dilalui oleh masyarakat kebanyakan. Melihat tempat dan sasaran dari pemajannya pun dapat dipastikan bahwa pesan itu untuk masyarakat awam. Akan lebih efektif apabila pesan-pesan itu disampaikan dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan jelas. Namun demikian, pemilik pesan itu tidak menghiraukan hal tersebut, tetapi justru lebih memilih untuk mengambil istilah dari bahasa Inggris dan mencampurnya dengan bahasa Indonesia. Masyarakat awam mungkin tidak terlalu paham makna istilah yang dipungutnya. Akan tetapi, istilah-istilah itu telah luas dipakai oleh penutur lainnya, yang besar kemungkinan berasal dari kelompok 'elit' atau telah banyak bergaul dan terpengaruh oleh cara berbahasa kelompok 'elit'. Maka, mereka pun mengikuti apa yang mereka dengar dan/atau lihat dari sekelilingnya. Ikut-ikutan ini tampak dari, misalnya, ketidakcermatan dalam menulis ejaan istilah yang dipungut. Gejala keragaman berbahasa yang ditunjukkan oleh masyarakat kelompok 'elit' dan awam ini, khususnya dalam hal campur/alih kode, merupakan salah satu bukti kuat tentang adanya gelombang penggerusan bahasa nasional oleh bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Ketika gejala yang sama muncul pada awal tahun 80-an dan kini berulang dengan lebih kuat, sebetulnya bukan karena gagalnya model perencanaan bahasa nasional. Politik bahasa yang dibuat Pemerintah telah secara jelas menggariskan status masing-masing bahasa, yakni jawab pengembangan dan pembinaannya. Namun, mengingat bahasa Indonesia belum bisa dijadikan sebagai salah satu kebanggaan dan jati diri penuturnya, pengaruh dan tuntutan yang kuat dari lingkungan (global) untuk ikut menggunakan bahasa asing telah meruntuhkan atau setidaknya mengikis nasionalisme yang awalnya dibangun oleh para pencetus gagasan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang fungsinya mempersatukan rasa kebangsaan bangsa Indonesia. Gagasan ini kemudian memperoleh penguatan konstitusional yang menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Negara dengan garis politik bahasa yang termaktub dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2009.

c. Dalam dunia pendidikan

Sekolah bisa menjadi alat yang efektif untuk meneruskan rumusan politik bahasa yang telah digariskan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebagai wahanapendidikan jalur formal, sekolah bisa diharapkan menjadi saluran yang sangat penting dalam membina keterampilan dan kecermatan berbahasa siswa. Keterampilan berbahasa siswa dan warga masyarakat pada umumnya bisa dikatakan lebih banyak merupakan hasil daripembinaan yang dilakukan di masa persekolahan. Dengan demikian, peran dan tanggungjawab sekolah menjadi sangat penting. Namun demikian, tampaknya, kebijakan pendidikan akhir-

akhir ini tidak seutuhnya sejalandengan rumusan politik bahasa. Sampai sebelum Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiamembuat amar putusan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dikenal engan rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan oleh karenanya harus dihentikan, pembinaan keterampilan berbahasaIndonesia di tingkat persekolahan nyaris memperoleh tekanan yang luar biasa beratnya.

Terpaan lainnya adalah diberikannya keleluasaan kepada pihak sekolah untuk menentukansendiri pelajaran muatan lokal yang akan diberikan kepada siswanya. Banyak sekolah, baik diperkotaan maupun di pedesaan, yang kemudian memilih bahasa Inggris sebagai matapelajaran muatan lokal. Untuk sekolah-sekolah dengan status RSBI, bahasa Inggris digunakan sebagai bahasapengantar untuk beberapa mata pelajaran tertentu. Tujuannya adalah untuk memajankansiswa kepada wacana akademik dalam bahasa Inggris, sehingga apabila siswa masuk kedalam percaturan akademik yang lebih global, mereka bisa berwacana dengan sejawatnya. Sementara itu, pemilihan bahasa Inggris menjadi muatan lokal bahkan pada pendidikan dikelas-kelas awal pendidikan dasar dan juga prasekolah, selain sebagai upaya untukmemajukan siswa kepada bahasa internasional itu, juga tampaknya lebih merupakan upayauntuk menaikkan gengsi sekolah. Betapa tidak. Sekolah yang memiliki muatan lokal bahasaInggris berani tampil mengiklankan diri sebagai sekolah unggul dan akibatnya memungutbiaya

pendidikan yang lebih bahkan sangat mahal.

Kebijakan pendidikan seperti disebutkan di atas tadi, sampai sejauh tertentu, dapat menjadincaman terhadap keberhasilan penerapan politik bahasa. Pihak sekolah (kepala sekolah dan guru) akan berupaya memacu keterampilan berbahasa Inggris semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran mata-mata pelajaran tertentu tadi. Sementara, siswa juga akan berusaha mengedepankan penguasaan bahasa Inggris mereka agar berhasil dalam pembelajarannya. Bisa jadi, pembinaan keterampilan berbahasa Indonesia tidak menjadi fokus pihak sekolah dan siswa. Akibatnya, keterampilan berbahasa Indonesia siswanya khususnya menjadi tidak kokoh, karena memang tidak diarahkan oleh pihak sekolah, yang awalnya justru diharapkan menjadi salah satu garda terdepan dalam pembinaan ini. Di lain pihak, pemajanan yang terlalu awal terhadap bahasa asing sementara penguasaan bahasa ibu atau bahasa nasional belum kokoh akan lebih banyak menjadi gangguan atau merusak perkembangan bahasa ibu atau bahasa nasional.

Pemajanan bahasa Inggris kepada anak-anak prasekolah oleh para guru bisa juga berpotensi mengganggu perkembangan bahasa anak. Guru bahasa Inggris di jenjang prasekolah belum tentu ahli dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk anak. Kegiatan belajar mengajar dengan materi pembelajaran yang tidak secara cermat memperhatikan perkembangan kebahasaan siswa justru akan membahayakan perkembangan bahasa

anak itu sendiri. Pada usia prasekolah, anak masih sedang belajar mengonstruksi bahasa ibunya dan sesekali secara terbatas dipajankan juga kepada bahasa kedua. Bagaimanapun, konsep-konsep linguistik kedua bahasa ini belum secara kokoh tertanam dalam minda anak. Maka, apabila ada bahasa lain lagi yang harus dipelajari, potensi kekacauan akan makin besar. Bukannya proses transfer positif yang akan terjadi, melainkan interferensi negatiflah yang lebih mungkin terjadi. Guru yang tidak berpengalaman dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang proses pembelajaran yang ideal pada tingkat prasekolah akan lebih banyak menyampaikan materi berupa hafalan konsep nyata (*concretethings*) kepada anak-anak didiknya. Proses pembelajarannya dilakukan secara heuristik dengan mencampur kode secara intensif pada setiap tuturannya. Cara-cara seperti ini bisa menjadi propaganda negatif untuk siswa. Mereka dapat mengira bahwa berbahasa bisa dilakukan secara bebas, termasuk kalau harus mencampur-campur kode dari dua bahasa. Anggapan ini akan menumbuhkan sikap bahasa yang tidak positif dari para siswa. Akibatnya, bukannya rasa bangga berbahasa Indonesia, tetapi justru menganggap enteng bahasa nasional tersebut.

5. Usulan Jalan Keluar

Memang berat tantangan yang dihadapi untuk memartabatkan bahasa nasional di tengah-tengah kenyataan seperti digambarkan di atas. Akan tetapi, hal itu bukan berarti bahwa kita tidak perlu melakukan upaya dan berbenah agar pada akhirnya bahasa Indonesia dapat tampil sebagai bahasa yang bermartabat.

Sudah terbukti bahwa politik bahasa yang sifatnya hanyaperintah dari atas ke bawah (top downpolicy) belum berhasil menjamin tumbuhnya kebanggaanmemiliki dan menggunakan bahasa Indonesia di kalangan para penuturnya.Dari keempat jenis perencanaan/politik bahasa (korpus, status, pemerolehan, dan gengsi), tampaknya perencanaan pemerolehan dan gengsi menghadapi persoalan yang lebih rumit. perencanaan gengsi belum mampu mewujudkan bahasaIndonesia sebagai bahasa yang memiliki gengsi tinggi di kalangan para penuturnya. Oleh karenaitu, kegagalan model kebijakan/politik bahasa ini harus diperbaikimelalui upaya pendekatanlingua franca plus (cf. elaboratedcode).Melalui pendekatan ini, bahasa Indonesia difungsikanbukan hanya sebagai bahasa pengantar seperti di awal pertumbuhannya,tetapi bisa Jugaberfungsi dan berperan sebagai bahasa ilmu, bahasa bisnis, bahasa sastra, dan cerminan hargadiri penutur dan bangsanya.

Bahasa Indonesia bukan hanya menjadi tali pengikat antarsukubangsa untuk bisa saling memahami isi komunikasi di antara mereka. Lebih jauh daripada itu,bahasa Indonesia naik perannya menjadi instrumen yang akan digunakan penuturnya dalamsetiap komunikasinya. Menurut Patji (2011) ada dua model implementasi, yaitu model sosiologis-fungsional dan model

ekonomis. Masing-masing model dipaparkan berikut ini:

Model sosiologis-fungsional Melaluicaraini, mestidiupayakantumbuhnyakesadaranba hwabahasamerupakansatu-satunyaalatfungsional yang memberikandampakkomunikatif total. Artinya, setiappenuturmestisampaikedapaakeyaki nanbahwabahasa Indonesia memilikipotensi yang cukupuntukmemenuhisemuakebutuhank omunikasipenuturnya (sufficiency principle). Bahasa Indonesia bisadigunakanpadaberbagaiarah, baikresmimaupuntidakresmi, danuntukmembicarakananekatopik. Kalautahapinisudahtercapai, makadiharapkanwibawadangengsipenut urbahasa Indonesiaakantumbuhdengansendirinya. Pengokohanfungsisisosial-fungsionalbahasa Indonesia inidapatdilakukan, misalnyamelaluiIndonesianisasi. Mengambenarbahwagerakanmonolingua lisasiinisejauhtentukanbertentangand enganupayapemertahanandan/ataupelind unganbahasadaerah. Tahapinidiperlukangunamembenahiterle bihduluposisibahasa Indonesia ketikaberhadapandengankuatnyagerusa npengaruhbahasaasing. Walaupunbahasa Indonesia sulitbakhantikadimungkinmenjadibagiand arinilaibudayaintipenuturbahasa Indonesia, apabilabahasa Indonesia sudahbisamemerankanfungsisisosial-fungsionalnya, lama kelamaanpenuturbahasa Indonesia akanmenjadikanbahasa Indonesia sebagaisalahsatukekayaan yang

akan dipelihara bahkan diwariskannya kepada generasi berikutnya.

Peningkatan kesadaran seperti ini akan sejalan dengan naiknya peran, fungsi, dan pengaruh bahasa Indonesia di dalam kehidupan mereka.

Model ini juga menyiratkan makna bahwa setiap penutur bahasa Indonesia menjadi 'duta bahasa'. Masing-masing akan memberikan contoh berbahasa yang cermat dan pantas. Hal ini ikut menentukan perkembangan bahasa Indonesia di masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan awal masyarakat Indonesia yang lebih patriarkal, yakni akan mengikuti contoh perilaku baik dari orang-orang yang dituakan. Dalam kaitan ini, tokoh-tokoh tadi sejatinya menjadi model berbahasa bagi warganya. Namun, dengan menyadari agar setiap orang menjadi duta bahasa dan model berbahasa, perilaku baik dalam berbahasa itu bukan hanya akan diturunkan secara vertikal dalam keluarga patriarkal, tetapi juga akan menyebar secara horizontal. Cara ini akan bisa mempercepat kesadaran para penutur dalam meningkatkan martabat bahasa Indonesia.

Model ekonomis

Mobilitas ekonomi merupakan kunci dari pendekatan pengembangan bahasa melalui pasar Indonesia yang begitu luas belum bisa menciptakan peningkatan mobilitas ekonomi yang berarti. Pasar ini masih bersifat menerima 'titipan' dari pihak luar yang mengedepankan produk barang dan jasa dari dalam negeri sendiri.

Kondisi seperti ini akan menjadi hambatan dalam meningkatkan daya saing dan daya pakainya bahasa Indonesia pada transaksi ekonomi.

Kemajuan ekonomi pada beberapa negara berkembang seperti China, Thailand, dan Vietnam, misalnya, telah ikut mendorong perkembangan dan daya saing masing-masing bahasa di tengah derasnya gelombang pengaruh penggunaan bahasa Inggris dalam produk barang dan jasa yang mereka hasilkan. Bahasa Indonesia pun bisa berperan seperti itu apabila dukungan politik dan sosial benar-benar berpihak kepada keinginan untuk membumihkembangkan bahasa Indonesia.

Penutup

Upaya pemertabatan bahasa nasional seringkali diganggu oleh adanya kepentingan yang tidak memahaminya penting nyasebuah bahasa sebagai jatidiri bangsa.

Memang benar bahwa bahasa Indonesia saat ini belum menjadi bagian dari nilai inti budaya masyarakat bangsa Indonesia, merujuk kepada sejarah kelahiran (istilah) bahasa Indonesia pada 28 Oktober 1928. Akibatnya, sikap penutur bahasa Indonesia kepada bahasanya pun tidak terlalupositif.

Kondisi ini diperparah dengan model-model berbahasa saat ini yang secara kebetulan ditunjukkan dalam dialog oleh media massa dan tokoh-tokoh masyarakat serta pesohor yang kemudiannya diikuti oleh warga masyarakat. Pada tingkat dan fase tertentu pun Pemerintah seperti tidak menyadari bahwa kebijakan yang dibuatnya, khususnya terkait dengan kebijakan pendidikan justru telah melemahkan posisi dan perkembangan bahasa Indonesia.

Kalau hal ini terjadi, maka sesungguhnya bahasa nasional sedang mengalami pembusukan, oleh penuturnya sendiri. Dengan demikian, upaya untuk mengangkat derajat bahasa Indonesia menjadi bahasa yang jauh lebih bermartabat dari posisi saat ini adalah memberikan kebanggaan kepada para penuturnya menjadi semakin berat. Perlu upaya yang bisa menyatukan langkah dan menyamakan di antara semua pihak. Oleh karena itu, perencanaan bahasa Indonesia sebagai lingua franca plus bisa menjadi salah satu agenda yang perlu dipertimbangkan.

Referensi

- Azwar, Saefuddin. 2003. Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kridalaksana, Harimurti. 2001. Kamus Linguistik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Patji (2011). Bahasa Etnis di Indonesia terancam Punah. <http://www.tempo.co/read/news/2011/12/16/079372002/169-Bahasa-Etnis-di-Indonesia> Terancam-Punah. Diakses 17 September 2015.

Santoso, A. 2012. Studi Bahasa Kritis: Menguak Bahasa Membongkar Kuasa. Bandung: Penerbit Mandar Maju

Subroto, Edi, dkk. 2007. Model Pelestarian dan Pengembangan Kemampuan Berbahasa Jawa Krama di Kalangan Generasi Muda Wilayah Surakarta dan Sekitarnya. Laporan Hasil Penelitian Hibah Penelitian Tim Pascasarjana HPTP Tahun I Tahap I.

Notulen Seminar

Notulis : Rio Kurniawan, M.Pd.

Hepy Susanty

Pertanyaan:

Bagaimana peran bahasa Indonesia dalam pendidikan?

Jawaban:

Bahasa Indonesia telah diatur oleh UU sebagai bahasa pengantar pendidikan sehingga dalam konteks pendidikan kita mesti menggunakan bahasa Indonesia, walau dalam beberapa kali kesempatan kita bisa menggunakan bahasa daerah, namun penggunaan bahasa daerah tersebut hanyalah sebagai alat pembantu agar peserta didik paham akan materi yang diajarkan. Optimalisasi keterampilan bahasa juga menjadi tolak ukur yang penting dalam kaitannya dengan pemersatu bangsa.

Maya Fransiska

Pertanyaan:

Berikan contoh dan solusi bahasa Indonesia bisa menjadi alat pemersatu dan pemertahanan NKRI?

Jawaban:

Contohnya dengan menggunakan EYD yang benar dalam penulisan dan berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pula. Solusi dalam kaitan bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu dan pemertahanan NKRI yaitu dengan cara menghargai bahasa sendiri dan mengoptimalkan penggunaan EYD.

Hesti Wiranata

Pertanyaan:

Seberapa penting Bahasa Inggris (Asing) digunakan?

Jawaban:

Bahasa Inggris (Asing) penting namun jauh lebih penting Bahasa Indonesia karena itu merupakan identitas bangsa kita. Dalam penggunaan bahasa Inggris kita harus tahu konteks dan proporsinya.